

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Artje Tehupeior, *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Depok: RAS (Raih Asa Sukses), 2012).
- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia : Berdasarkan P. P. 24 Tahun 1997 Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (P. P. 37 Tahun 1998)* (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, jilid 1, Djambatan, Jakarta, hlm. 231.
- Dyara Radhithe, 2018, *Panduan Mengurus Tanah Rumah dan Perizinannya*, Legality, hlm. 107-108
- Effendi Peranginangin, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Praktisi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1991).
- FULLER, L. L. (1969). *The Morality of Law: Revised Edition*. Yale University Press.
- Gunawan Widjaja Kartini Muljadi, *Hak-Hak Atas Tanah* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta, hlm.2.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Nusa dan Nuansa*, Bandung, 2006.
- Maria Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi* (Jakarta: Kompas, 2006).
- Muhaimin, S.H, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm. 79
- SUDIKN0 MERTOKUSUMO, *TEORI HUKUM* (Yogyakarta: CAHAYA ATMA PUSTAKA, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suriansyah Murhaini, *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan* (Surabaya: LaksBang Justitia, 2009).
- Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).

Urip Santoso, *Hukum Agraria (Kajian Komprehensif)*, Kencana Prenamedia Grup, Jakarta
Santoso, 2012, hlm. 10

Waskito, M. Si, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana,
2019).

Jurnal

Laurensius Arliman, 'Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli', *Jurnal Selat*,
5.2 (2018).

Loupaty, P. I., Sembiring, J., & Luthfi, A. N. (2019). Keragaman Sistem Hukum Pertanahan
Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah Studi Pelaksanaan PTSL di Ohoi Ngabub dan
Ohoi Sathean, Provinsi Maluku. *Tunas Agraria*, 2(2), 1-21.

Mukmin, A. SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI SEMPURNA KEPEMILIKAN HAK
ATAS TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH.

Sugianto, B. (2017). Pendaftaran tanah adat untuk mendapat kepastian hukum di Kabupaten
Kepahiang. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 131-148.

Susilaningsih, T. (2019). PTSL Wujud Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah untuk Menjamin
Kepastian dan Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Tanah. *Jurnal Cakrawala
Hukum*, 10(1), 87-95.

Tehupeiory, A. (2016). PENGAKUAN HUKUM NASIONAL TERHADAP HUKUM
ADAT DALAM KEPEMILIKAN DAN PENGOLAHAN TANAH. *Jurnal
Tora*, 2(3), 393-400.

Veronika, T., & Winanti, A. (2021). KEBERADAAN HAK ATAS TANAH ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI KONSEPHAK
MENGUASAI OLEH NEGARA. *Humani (Hukum dan Masyarakat
Madani)*, 11(2), 305-317.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Percepatan PTSL.

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No.1 tentang Hak Ulayat Masyarakat (Hukum) adat
Batak Toba Samosir

Andrews Peatalun Napitupulu, 2022

***AKIBAT HUKUM KONVERSI HAK ATAS TANAH ULAYAT DALAM PROGRAM PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SAMOSIR***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]